Pers Release
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah
Senin, 26 Oktober 2026

“Berbulan-bulan Menghirup Racun, ISPA Meningkat: WALHI Kalteng Tagih Tanggung Jawab Negara atas Kesehatan Rakyat ”

Per Sabtu, 24 Oktober 2026, berdasarkan pemantauan melalui situs IQAir, kualitas udara di Kota Palangka Raya tercatat mencapai angka 1.104 untuk konsentrasi PM2.5. Sementara itu, berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dari Kementerian Lingkungan Hidup, indeks kualitas udara dilaporkan menyentuh angka 1.300 dengan kategori berbahaya. Sejumlah kabupaten lain di Kalimantan Tengah juga mengalami kondisi serupa, dengan kualitas udara yang memburuk dan wilayah yang masih dikepung kabut asap.

WALHI Kalimantan Tengah menilai kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam melakukan pencegahan dan mitigasi bencana ekologis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahunnya. Berulangnya karhutla menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum berjalan secara optimal, sementara masyarakat kembali harus menanggung dampak buruknya, terutama terhadap kesehatan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dampak krisis asap ini semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tercatat sebanyak 26.740 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Tengah, dengan 5.133 kasus di antaranya dialami oleh anak-anak. Sementara itu, berdasarkan pemantauan WALHI Kalimantan Tengah, masyarakat juga menghadapi berbagai keluhan kesehatan, mulai dari ISPA, batuk berdahak, diare, hingga gangguan kesehatan lainnya. Kondisi ini memperlihatkan besarnya ancaman yang dihadapi masyarakat akibat krisis kabut asap, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia yang membutuhkan perlindungan lebih serius.

Setelah berbulan-bulan menghirup racun akibat kepungan asap, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin datang untuk memantau langsung kondisi di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya. Peninjauan terhadap fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan merupakan langkah penting dalam melihat kesiapan penanganan masyarakat terdampak. Namun, WALHI Kalimantan Tengah mempertanyakan mengapa penanganan baru menjadi perhatian serius ketika masyarakat telah mengalami dampak kesehatan yang mengkhawatirkan setelah terpapar asap selama berbulan-bulan. Negara seharusnya hadir sejak awal melalui langkah pencegahan dan mitigasi yang terukur, bukan hanya bergerak ketika masyarakat mulai jatuh sakit.

Merespon peristiwa ini, **Janang Firman Palanungkai** selaku **Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah**. *“Hampir 4 bulan warga di Kalimantan Tengah menghirup asap dengan kategori berbahaya. Pejabat negara dari Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa Menteri sudah mengunjungi Kalimantan Tengah. Namun hingga sekarang belum juga ditemukan kebijakan yang konkrit dan benar-benar menyelesaikan masalah. Kami juga menegaskan bahwa tanggungjawab negara tidak hanya sampai pada upaya memadamkan api saja, karena tanggung jawab atas kesehatan dan ekonomi warga juga mesti jadi perhatian khusus. Penegakkan hukum pada pelaku pembakar hutan dan lahan juga mesti segera diusut dan dibawa ke pengadilan. Karna karhutla di Kalteng saat ini adalah persoalan struktural, bukan kebakaran biasa,”* Tegasnya.

Janang juga mempertanyakan kebijakan pasca Menteri Kesehatan Republik Indonesia datang ke Palangka Raya baru-baru ini untuk meninjau situasi kabut asap serta datang ke beberapa fasilitas kesehatan. *"Sebelumnya Menteri ada mengeluarkan statment untuk menghimbau bahwa warga harus adaptasi dengan kondisi kabut asap. Kemarin (23/10/2026) Menteri kunjungan ke Palangka Raya, langit Palangka Raya saat itu berwarga Orange dan banyak warga yang sesak nafas. Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, apakah akan ada perubahan kebijakan dan perspektif yang berpihak pada korban atau hanya akan menghasilkan kunjungan semata? Apakah akan ada banyak fasilitas kesehatan dan pengobatan gratis pada korban asap setelah ini? ini adalah pertanyaan kritis kami untuk bapak Menteri. Mengingat kebijakan strategis di pemerintah provinsi dan kabupaten hingga saat ini kami belum menemukan langkah yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada. Persoalan kesehatan masyarakat jangan sampai dianggap remeh, karna selain saat ini, pasca kabut asap juga memungkinkan dampaknya masih terasa bagi masyarakat,"* Tegasnya.

Selain itu, Janang menambahkan bahwa respon warga terhadap peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap saat ini sangat beragam dan benar-benar mempertanyakan langkah konkrit pemerintah. *"Selain banyaknya protes lewat media sosial, juga dilaksanakan Aksi Massa berjilid-jilid di kantor pemerintahan. Bahkan WALHI Kalteng sendiri sudah sejak bulan April mengingatkan pemerintah tentang dampak Godzilla El Nino. Sudah sepantasnya pemerintah agresif, preventif, dan terstruktur dalam menyikapi persoalan saat ini. Penetapan status Bencana Nasional menjadi penting, agar penanganan Karhutla dan kabut asap bisa lebih besar lain. Kami menilai pemerintah daerah saat ini sudah hampir tidak sanggup. Jangan sampai korban semakin banyak, pemerintah masih lamban menyelesaikan masalah. Jangan sampai banyak acara seremonial pejabat saja yang ditonjolkan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan pokok. Milliaran Rupiah dana penanganan kahutla beberapa kali disampaikan, namun penanganan masih seperti jalan ditempat. Penting BPK atau BPK turun untuk menyelidiki hal ini. Jangan sampai ada yang meraup keuntungan dibalik penderitaan masyarakat di Kalimantan Tengah,"* tambahnya.

Memperkuat yang disampaikan Janang **Agung Sesa** selaku **Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalimantan Tengah** "*Kualitas udara yang bersih dan sehat adalah hak setiap warga negara, bukan persoalan yang dapat dipandang sebelah mata. Koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus berjalan secara serius, terpadu, dan terukur, terlebih ketika krisis kabut asap telah mengancam kesehatan masyarakat selama berbulan-bulan. WALHI Kalimantan Tengah mendesak pemerintah segera menetapkan kondisi ini sebagai bencana nasional, membuka akses informasi dan penanganan seluas-luasnya bagi masyarakat terdampak, serta memastikan langkah perlindungan kesehatan dan pemulihan lingkungan dilakukan secara menyeluruh. Negara juga harus berani mengakui kegagalannya dalam melindungi masyarakat dan menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat yang terpaksa terus-menerus menghirup racun akibat kabut asap*." Tegasnya.

Kontak Person :

1. **Janang Firman P.** **0813-5125-9183**
2. **Agung Sesa** **0852-8183-8201**